



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,





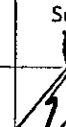
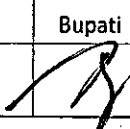
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017, tentang Hak Keungan Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 263 );
11. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**




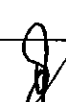
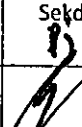
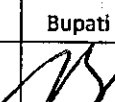
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.**

**BAB I**







**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas sekretariats desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

menyepakati hal yang bersifat strategis.




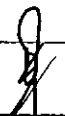

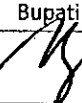
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

## BAB II

### PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Lainnya;
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah diterima laporan audit keuangan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pagu dana perimbangan maka

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Alokasi Dana Desa akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

**BAB III**  
**PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 3**

Pengalokasian ADD mempertimbangkan :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah Desa;
- c. angka kemiskinan; dan
- d. tingkat kesulitan geografis.

**Pasal 4**

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.







**BAB IV**  
**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

**Paragraf 1**

**Ruang Lingkup Transfer Alokasi Dana Desa**

**Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa ditransfer melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan.
- (2) Alokasi Dana Desa ditransfer setiap bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan khusus biaya operasional pemerintahan desa di transfer per triwulan.
- (3) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan lebih dari alokasi untuk 1(satu bulan bersamaan setelah persyaratan transfer terpenuhi.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

## Pasal 8

- (1) Rekening Kas Desa tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

## Paragraf 2







### Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa ke Rekening Kas Desa, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor Rekening Kas Desa sebagai penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

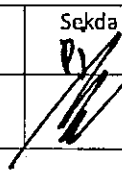
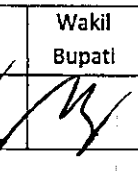
## Pasal 7

- (1) Transfer Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk transfer bulan pertama pada awal tahun anggaran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
    1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 beserta

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

lampiran;

2. Fotocopy Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2022 beserta hasil verifikasi Tim Asistensi Kecamatan;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Perangkat Desa;
  5. Fotocopy Rekening Giro Kas Desa; dan
  6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa.
- b. Untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. Lembar konfirmasi atas dana transfer bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan;
  2. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer yang telah diverifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan.
  3. Laporan Realisasi APBD Desa Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun.
- c. Khusus transfer setelah Perubahan APBDes Tahun 2022, Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. Perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya.
  2. Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2022.
- (3) Khusus untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Bendahara Umum Daerah setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berjalan, kecuali tunjangan, honor/insentif dan operasional Pemerintahan Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
4	8	✓	g		









- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa jika Kepala Desa belum memenuhi kewajiban laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Penundaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga atas kewajiban laporan atas Dana Desa (APBN).

**BAB V**  
**PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 8**

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk:
  - a. kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    3. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    4. tunjangan kesejahteraan;
    5. tunjangan kinerja; dan
    6. operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. kegiatan bidang pembangunan desa;  
Kegiatan pembangunan desa Kegiatan Sesuai Kewenangan berskala Lokal Desa dan sesuai kesepakatan musyawarah Desa.
  - c. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan;  
Kegiatan pembinaan kemasyarkatan sesuai kewenangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa.
  - d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; dan  
Kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Kewenangan berskala lokal desa dan sesuai kesepakatan musyawarah desa.
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- (2) Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa agar mengacu pada Rencana

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Kerja Pemerintah Desa yang telah disepakati melalui musyawarah Desa dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah.

- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam APB Desa menggunakan presentase sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dan;
    - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 9







Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa, dengan ketentuan :
- a. Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa;
  - b. Pencairan Alokasi Dana Desa harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- c. Pencairan Alokasi Dana Desa harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11







- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022, seluruh penggunaan Alokasi Dana Desa telah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terdapat saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi Silpa pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, serta Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan.
- (3) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana desa, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa pada Desa yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pengelola keuangan desa dan pihak terlibat dapat dituntut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Alokasi Dana Desa yang disalahgunakan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN





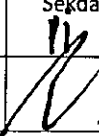

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal, 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR. 406

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

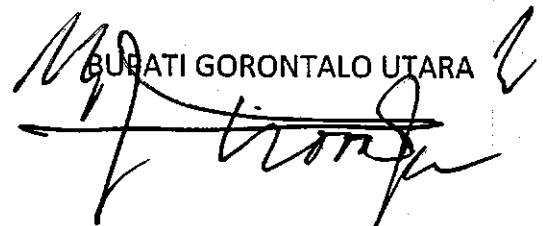
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA







NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				29,505,515,760
	1.1.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	2,426,640	3,581,720,640
	1.1.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	2,224,420	3,283,243,920
	1.1.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	2,022,200	10,701,482,400
	1.2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				2,214,000,000
	1.2.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	1,500,000	2,214,000,000
	1.3	Tunjangan Kedudukan BPD				3,568,811,400
	1.3.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	519,750	767,151,000
	1.3.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	467,775	1,380,871,800
	1.3.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	441,788	1,420,788,600
	1.4	Tunjangan Kinerja BPD				2,676,179,400
	1.4.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	389,750	575,271,000
	1.4.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	350,775	1,035,487,800
	1.4.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	331,288	1,065,420,600
	1.5	Operasional Pemerintahan Desa				3,035,493,440
	1.5.1	Operasional Pemerintah Desa	123	1 Paket	5,000,000	615,000,000
	1.5.3	Operasional BPD	123	1 Paket	4,078,808	501,693,384
	1.5.4	Operator Desa	123	12 Bulan	1,300,000	1,918,800,000
	1.5.5	Pembulatan	1	1 Paket	56	56
		<b>TOTAL</b>				41,000,000,000

BUPATI GORONTALO UTARA  
  
 INDRA YASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ATINGGOLA		4,730,054,792	407,675,520	373,702,560	679,459,200	679,459,200	53	1,286,119,200
1		IMANA	384,555,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
2		BINTANA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		BUATA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		PINONTOYONGA	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
5		MONGGUPO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
6		KOTAJIN	390,268,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	6	145,598,400
7		ILOMATA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
8		ILOHELUMA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		WAPALO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	-3	72,799,200
10		POSONO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
11		SIGASO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
12		TOMBULILATO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	-4	97,065,600
13		KOTAJIN UTARA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
14		OLUHUTA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Di Sekda	Wakil Bupati

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : DESEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALO

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	ATINGGOLA		252,000,000	65,478,000	58,930,200	58,930,200	30	119,263,500	87,318,000	78,586,200	78,586,200	159,043,500	30
1		IMANA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
2		BINTANA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		BUATA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		PINONTOYONGA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		MONGGUPO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		KOTAJIN	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		ILOMATA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		ILOHELUMA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		WAPALO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		POSONO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
11		SIGASO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
12		TOMBULILATO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
13		KOTAJIN UTARA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
14		OLUHUTA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2021  
 TANGGAL : DESEMBER 2021  
 TENTANG : TATA CARA PENGALO

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa			OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
1	ATINGGOLA		4,384,551,480	70,000,000	57,103,312	127,103,312	218,400,000	218,400,000	4,730,054,792
1		IMANA	359,877,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	384,555,928
2		BINTANA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
3		BUATA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		PINONTOYONGA	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
5		MONGGUPO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
6		KOAJIN	365,589,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	390,268,528
7		ILOMATA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
8		ILOHELUMA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		WAPALO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
10		POSONO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
11		SIGASO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
12		TOMBULILATO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
13		KOAJIN UTARA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
14		OLUHUTA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	KWANDANG		6,262,565,904	524,154,240	480,474,720	873,590,400	873,590,400	72	1,747,180,800
1		PONTOLO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		MOLINGGAPOTO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		LEBOTO	360,289,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		POSSO	360,289,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
5		TITIDU	384,555,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
6		MOLUO	336,023,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		MOOTINELO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		BUALEMO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		BULALO	457,355,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	8	194,131,200
10		KATIALADA	360,289,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
11		OMBULODATA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
12		ALATA KARYA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
13		CISADANE	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
14		BOTUWOMBATO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
15		BOTUNGOBUNGO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
16		MOLNGK. SELATAN	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
17		PONTOLO ATAS	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II	KWANDANG		324,000,000	84,186,000	75,767,400	75,767,400	48	190,821,600	112,266,000	101,039,400	101,039,400	254,469,600	48
1		PONTOLO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		MOLINGGAPOTO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		LEBOTO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
4		POSSO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
5		TITIDU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
6		MOLUO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
7		MOOTINELO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		BUALEMO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		BULALO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
10		KATIALADA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
11		OMBULODATA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
12		ALATA KARYA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
13		CISADANE	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
14		BOTUWOMBATO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
15		BOTUNGOBUNGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
16		MOLNGK. SELATAN	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
17		PONTOLO ATAS	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Bj Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
II	KWANDANG		5,818,347,360	90,000,000	73,418,544	163,418,544	280,800,000	280,800,000	6,262,565,904
1		PONTOLO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
2		MOLINGGAPOTO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
3		LEBOTO	335,610,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	360,289,528
4		POSSO	335,610,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	360,289,528
5		TITIDU	359,877,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	384,555,928
6		MOLUO	311,344,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	336,023,128
7		MOOTINELO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		BUALEMO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
9		BULALO	432,676,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	457,355,128
10		KATIALADA	335,610,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	360,289,528
11		OMBULODATA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
12		ALATA KARYA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
13		CISADANE	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
14		BOTUWOMBATO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
15		BOTUNGOBUNGO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
16		MOLNGK. SELATAN	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
17		PONTOLO ATAS	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		MASURU	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
III	ANGGREK		5,357,274,720	436,795,200	400,395,600	727,992,000	727,992,000	68	1,650,115,200
1		ILANGATA	433,088,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	7	169,864,800
2		TOLONGIO	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
3		TOLANGO	360,289,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		POPALO	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
5		DUDEPO	390,268,528	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	6	145,598,400
6		MOOTILANGO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		LANGGE	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		TUTUWOTO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		HIYALOOILE	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
10		IBARAT	414,534,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	7	169,864,800
11		ILOHELUMA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
12		ILODULUNGA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
13		PUTIANA	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
14		HELUMO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
15		DATAHU	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
18		MASURU	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
III	ANGGREK		4,987,092,600	75,000,000	61,182,120	136,182,120	234,000,000	234,000,000	5,357,274,720
1		ILANGATA	408,409,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	433,088,728
2		TOLONGIO	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
3		TOLANGO	335,610,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	360,289,528
4		POPALO	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
5		DUDEPO	365,589,720	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	390,268,528
6		MOOTILANGO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
7		LANGGE	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		TUTUWOTO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		HIYALOOILE	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
10		IBARAT	389,856,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	414,534,928
11		ILOHELUMA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
12		ILODULUNGA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
13		PUTIANA	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
14		HELUMO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
15		DATAHU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bugati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	SUMALATA		3,650,602,208	320,316,480	293,623,440	533,860,800	533,860,800	38	922,123,200
1		BULONTIO TIMUR	384,555,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
2		BULONTIO BARAT	336,023,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		BULOILA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		KASIA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		KIKIA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		TUMBA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		MEBONGO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		LELATO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		PULOHENTI	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		PUNCAK MANDIRI	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
11		HUTAKALO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IV	SUMALATA		198,000,000	51,447,000	46,302,300	46,302,300	26	103,361,700	68,607,000	61,746,300	61,746,300	137,837,700	26
1		BULONTIO TIMUR	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
2		BULONTIO BARAT	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	4	15,901,800	6,237,000	5,613,300	5,613,300	21,205,800	4
3		BULOILA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		KASIA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		KIKIA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		TUMBA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		MEBONGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		LELATO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		PULOHENTI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		PUNCAK MANDIRI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
11		HUTAKALO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2







Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
IV	SUMALATA		3,379,135,320	55,000,000	44,866,888	99,866,888	171,600,000	171,600,000	3,650,602,208
1		BULONTIO TIMUR	359,877,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	384,555,928
2		BULONTIO BARAT	311,344,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	336,023,128
3		BULOILA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		KASIA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
5		KIKIA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
6		TUMBA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
7		MEBONGO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		LELATO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
9		PULOHENTI	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
10		PUNCAK MANDIRI	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
11		HUTAKALO	317,056,920	5,000,000	4,078,898	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728







Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	TOLINGGULA		3,271,758,880	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	34	825,057,600
1		TOLINGGULA TENGAH	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		TOLINGGULA PANTAI	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
3		TOLINGGULA ULU	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		LIMBATO	293,202,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
5		PAPULANGI	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
6		MOLANGGA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		CEMPAKA PUTIH	293,202,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
8		TOLITE JAYA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
9		ILOMANGGA	293,202,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
10		ILOTUNGGULO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600

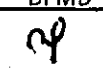
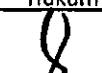
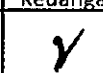

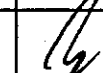
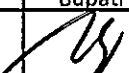
Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
V	TOLINGGULA		3,024,970,800	50,000,000	40,788,080	90,788,080	156,000,000	156,000,000	3,271,758,880
1		TOLINGGULA TENGAH	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
2		TOLINGGULA PANTAI	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
3		TOLINGGULA ULU	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
4		LIMBATO	268,524,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	293,202,928
5		PAPULANGI	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
6		MOLANGGA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
7		CEMPAKA PUTIH	268,524,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	293,202,928
8		TOLITE JAYA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
9		ILOMANGGA	268,524,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	293,202,928
10		ILOTUNGGULO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	GENTUMA RAYA		3,516,429,008	320,316,480	293,623,440	533,860,800	533,860,800	34	825,057,600
1		GENTUMA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		DUMOLODO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		MOLONGGOTA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		IPILO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		LANGKE	293,202,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
6		PASALAE	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		NANATI JAYA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		KETAPANG	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		MOTOMINGO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		DURIAN	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
11		BOHUSAMI	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VI	GENTUMA RAYA		198,000,000	51,447,000	46,302,300	46,302,300	22	87,459,900	68,607,000	61,746,300	61,746,300	116,631,900	22
1		GENTUMA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		DUMOLODO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		MOLONGGOTA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		IPILO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		LANGKE	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		PASALAE	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		NANATI JAYA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		KETAPANG	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		MOTOMINGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		DURIAN	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
11		BOHUSAMI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa			OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
VI	GENTUMA RAYA		3,244,962,120	55,000,000	44,866,888	99,866,888	171,600,000	171,600,000	3,516,429,008
1		GENTUMA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
2		DUMOLODO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
3		MOLONGGOTA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		IPILO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
5		LANGKE	268,524,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	293,202,928
6		PASALAE	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
7		NANATI JAYA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		KETAPANG	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		MOTOMINGO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
10		DURIAN	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
11		BOHUSAMI	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

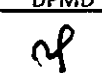
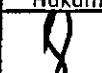
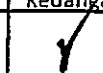
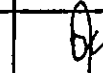
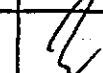
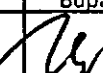
Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	TOMILITO		3,344,558,080	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	37	897,856,800
1		DAMBALO	366,002,128	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	5	121,332,000
2		MILANGO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		JEMBATAN MERAH	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		BUBODE	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
5		LEYAO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		MOLANTADU	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
7		HUIDU MELITO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
8		BULANGO RAYA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		TANJUNG KARANG	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
10		MUTIARA LAUT	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					









NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VII	TOMILITO		180,000,000	46,770,000	42,093,000	42,093,000	20	79,509,000	62,370,000	56,133,000	56,133,000	106,029,000	20
1		DAMBALO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		MILANGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		JEMBATAN MERAH	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		BUBODE	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		LEYAO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		MOLANTADU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		HUIDU MELITO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		BULANGO RAYA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		TANJUNG KARANG	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		MUTIARA LAUT	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	25	28	35	37	42
VII	TOMILITO		3,097,770,000	50,000,000	40,788,080	90,788,080	156,000,000	156,000,000	3,344,558,080
1		DAMBALO	341,323,320	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	366,002,128
2		MILANGO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
3		JEMBATAN MERAH	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
4		BUBODE	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
5		LEYAO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
6		MOLANTADU	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
7		HUIDU MELITO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
8		BULANGO RAYA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		TANJUNG KARANG	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
10		MUTIARA LAUT	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>af</i>	<i>8</i>	<i>r</i>	<i>Op</i>	<i>1/2</i>	<i>ny</i>







NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
			PENDAPATAN TRANSFER	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				ADD	SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	PONELO KEP.		1,269,877,312	116,478,720	106,772,160	194,131,200	194,131,200	12	291,196,800
1		PONELO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		MALAMBE	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		OTIOLA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		TIHENGGO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					






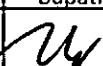
NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIII	PONELO KEP.		72,000,000	18,708,000	16,837,200	16,837,200	8	31,803,600	24,948,000	22,453,200	22,453,200	42,411,600	8
1		PONELO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		MALAMBE	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		OTIOLA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		TIHENGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					







NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
VIII	PONELO KEP.		1,171,162,080	20,000,000	16,315,232	36,315,232	62,400,000	62,400,000	1,269,877,312
1		PONELO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
2		MALAMBE	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
3		OTIOLA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		TIHENGGO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	MONANO		3,247,492,536	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	33	800,791,200
1		MONANO	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
2		TUDI	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
3		MONAS	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
4		DUNU	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		GARAPIA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		SOGU	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		PILOHULATA	341,735,728	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	4	97,065,600
8		MOKONOWU	317,469,384	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		TOLITEHUYU	293,202,928	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	2	48,532,800
10		ZURIYATI	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IX	MONANO		180,000,000	46,770,000	42,093,000	42,093,000	20	79,509,000	62,370,000	56,133,000	56,133,000	106,029,000	20
1		MONANO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		TUDI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		MONAS	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		DUNU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		GARAPIA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		SOGU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		PILOHULATA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		MOKONOWU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		TOLITEHUYU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		ZURIYATI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
IX	MONANO		3,000,704,400	50,000,000	40,788,136	90,788,136	156,000,000	156,000,000	3,247,492,536
1		MONANO	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
2		TUDI	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
3		MONAS	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
4		DUNU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
5		GARAPIA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
6		SOGU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
7		PILOHULATA	317,056,920	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	341,735,728
8		MOKONOWU	292,790,520	5,000,000	4,078,864	9,078,864	15,600,000	15,600,000	317,469,384
9		TOLITEHUYU	268,524,120	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	293,202,928
10		ZURIYATI	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN TRANSFER  ADD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
				SILTAP KADES	SEKDES	KAUR	SEKSI	JLH DSN	KADUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	BIAU		3,174,693,280	291,196,800	266,930,400	485,328,000	485,328,000	30	727,992,000
1		BIAU	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
2		OMUTO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
3		LUHUTO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
4		WINDU	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
5		TOPI	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
6		SEMBIHINGAN	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
7		DIDINGGA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
8		BUALO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
9		POTANGA	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200
10		BOHULO	317,469,328	29,119,680	26,693,040	48,532,800	48,532,800	3	72,799,200

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Pj Sekda	Wakil Bupati

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X	BIAU		180,000,000	46,770,000	42,093,000	42,093,000	20	79,509,000	62,370,000	56,133,000	56,133,000	106,029,000	20
1		BIAU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		OMUTO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		LUHUTO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		WINDU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		TOPI	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		SEMBIHINGAN	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		DIDINGGA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		BUALO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		POTANGA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		BOHULO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2

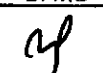
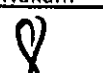
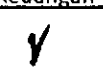
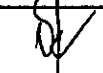


Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>af</i>	<i>el</i>		<i>af</i>	<i>el</i>	<i>af</i>

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
X	BIAU		2,927,905,200	50,000,000	40,788,080	90,788,080	156,000,000	156,000,000	3,174,693,280
1		BIAU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
2		OMUTO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
3		LUHUTO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		WINDU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
5		TOPI	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
6		SEMBIHINGAN	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
7		DIDINGGA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		BUALO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		POTANGA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
10		BOHULO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328

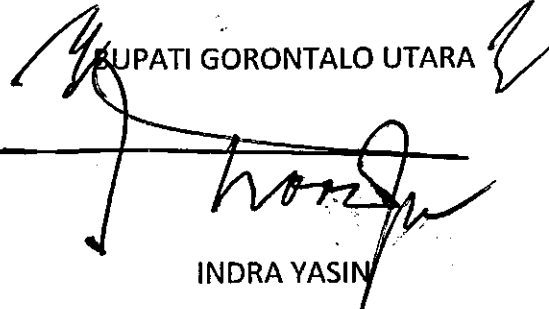
Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja					Tunjangan Kedudukan BPD				
			Tunjangan Jabatan Kades	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	JLH ANG BPD	ANGGOTA BPD	KETUA BPD	WAKIL KETUA BPD	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA BPD	JLH ANG BPD
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
XI	SUMALATA TIMUR		180,000,000	46,770,000	42,093,000	42,093,000	20	79,509,000	62,370,000	56,133,000	56,133,000	106,029,000	20
1		DEME SATU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
2		BULUWATU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
3		DULUKAPA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
4		DEME DUA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
5		BULADU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
6		HULAWA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
7		WUBUDU	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
8		BUBALANGO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
9		MOTIHELUMO	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
10		KOLUWOKA	18,000,000	4,677,000	4,209,300	4,209,300	2	7,950,900	6,237,000	5,613,300	5,613,300	10,602,900	2
TOTAL			2,214,000,000	575,271,000	517,743,900	517,743,900	268	1,065,420,600	767,151,000	690,435,900	690,435,900	1,420,788,600	268

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TOTAL SILTAP, TUNJANGAN DAN TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			BIDANG PENYELENGGAR AAN	TOTAL HONOR OPERATOR DESA	TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (PAGU ADD PER DESA)
				Operasional Pemerintahan Desa		JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	OPERATOR DESA		
				Pemerintah Desa	BPD				
1	2	3	23	24	26	28	35	37	42
XI	SUMALATA TIMUR		2,927,905,200	50,000,000	40,788,080	90,788,080	156,000,000	156,000,000	3,174,693,280
1		DEME SATU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
2		BULUWATU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
3		DULUKAPA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
4		DEME DUA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
5		BULADU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
6		HULAWA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
7		WUBUDU	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
8		BUBALANGO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
9		MOTIHELUMO	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
10		KOLUWOKA	292,790,520	5,000,000	4,078,808	9,078,808	15,600,000	15,600,000	317,469,328
<b>TOTAL</b>			<b>37,964,506,560</b>	<b>615,000,000</b>	<b>501,693,440</b>	<b>1,116,693,440</b>	<b>1,918,800,000</b>	<b>1,918,800,000</b>	<b>41,000,000,000</b>

  
 BUPATI GORONTALO UTARA  
 INDRA YASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
